



KEPALA DESA TEGALRANDU KECAMATAN SRUMBUNG

PERATURAN DESA TEGALRANDU

NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

( APBDesa )

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALRANDU,

- Menimbang :
- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7 );, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrandu Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tegalrandu Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrandu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tegalrandu Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrandu Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staff Perangkat Desa di kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59)
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7 );

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Tegalarandu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tegalarandu (Lembaran Desa Tegalarandu Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tegalarandu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalarandu Tahun 2021 (Lembaran Desa Tegalarandu Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Tegalarandu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalarandu Tahun 2021 ( Lembaran Desa Tegalarandu Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Tegalarandu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di desa Tegalarandu

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  2. Instruksi Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat skala mikro di Desa;
  3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan Anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah;
  5. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/664/01.01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Magelang;

6. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 141/291/13/2021 Tanggal 9 Pebruari 2021 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Desa melalui APBDesa.
7. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD Tanggal 10 Februari Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Desa;
8. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2020 tentang Pemutakhiran Data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALRANDU  
 dan  
 KEPALA DESA TEGALRANDU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALRANDU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.547.198.006,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	658.062.490,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	427.158.192,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	31.714.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	226.185.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	209.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.552.720.482,00</u>
Surplus / Defisit	Rp.	- 5.522.476,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	23.006.435,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>23.006.435,00</u>
Silpa Berjalan	: Rp.	17.483.959,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Lampiran I : Laporan Keuangan terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi APBDesa
  - b. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalrandu.

Ditetapkan di Tegalrandu  
pada tanggal 28 Januari 2022  
KEPALA DESA TEGALRANDU,

ttd

AMAD MUDRIK

Diundangkan di Tegalrandu  
pada tanggal 29 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA TEGALRANDU

ttd

DWI LESTARI

LEMBARAN DESA TEGALRANDU TAHUN 2022 NOMOR 1



















